



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SENIN, 3 AGUSTUS 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI



Bupati Subandi menegaskan perang melawan miras.

Razia Serentak 18 Kecamatan di Sidoarjo

Subandi Tegaskan Perang Lawan Miras

Sidoarjo-HARIAN BANGSA

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar razia minuman keras (miras) secara serentak di 18 kecamatan, Sabtu (1/8/2026) malam. Operasi yang melibatkan Forkopimda, Forkopimka, serta seluruh camat itu berhasil menyita 1.696 botol miras dari berbagai lokasi.

Temuan terbesar berasal dari kawasan Graha Kota. Petugas mengamankan 851 botol miras dari sebuah ruko yang berkedok toko vape. Sementara 845 botol lainnya disita dari sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan razia dilakukan sebagai bentuk komitmen pemer-

Razia Serentak, Sita 1.696 Botol Miras, Gudang Berkedok Toko Vape Terbongkar

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mengencakan pemberantasan peredaran minuman keras (miras) ilegal. Dalam razia gabungan yang digelar secara serentak, Sabtu (1/8) malam, petugas berhasil menyita 1.696 botol miras dari berbagai lokasi. Salah satu temuan terbesar berasal dari sebuah gudang yang berkedok toko vape di kawasan Graha Kota Sidoarjo.

Razia tersebut melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo.



TEGAS: Bupati Sidoarjo Subandi memimpin razia minuman keras (miras) ilegal di sejumlah lokasi di Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (1/8) malam.

menyatakan, razia serentak ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menekan peredaran miras yang kerap menjadi pemicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. "Sidoarjo perang melawan miras. Alhamdulillah, malam ini teman-teman camat bergerak serentak dan berhasil menemukan peredaran miras di sejumlah wilayah," ujar Subandi.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, razia serentak ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menekan peredaran miras yang kerap menjadi pemicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. "Sidoarjo perang melawan miras. Alhamdulillah, malam ini teman-teman camat bergerak serentak dan berhasil menemukan peredaran miras di sejumlah wilayah," ujar Subandi.

Menurutnya, temuan gudang miras yang disamar sebagai toko vape menunjukkan pelaku terus mencari cara untuk mengelabui petugas. "Kalau dilihat dari depan memang toko vape. Setelah direk ke bagian belakang, ternyata digunakan sebagai gudang miras. Jumlahnya sekitar 851 botol," ungkapnya.

Selain menyita ribuan botol miras, petugas juga menemukan dugaan penyelundupan

izin usaha. Salah satu pemegang izin distributor diduga menjual minuman keras secara seoran kepada masyarakat melalui aplikasi daring, padahal praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subandi menegaskan, Pemkab Sidoarjo tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang menyalahgunakan izin untuk mengedarkan miras secara ilegal. (dik/vgo)



Bupati Sidoarjo, Subandi memimpin langsung razia toko miras di Perumahan Kahuripan Nirwana Village.

Tutup 3 Toko di KNV

Sidoarjo, Memorandum

Bupati Sidoarjo Subandi memimpin tegas tempat penjualan minuman keras (miras) yang menyalahi ketentuan. Tiga tempat penjualan miras di ruko ditutup saat itu juga saat inspeksi mendadak (sidak) Jumat malam, (31/7).

Tiga ruko itu berada di kawasan Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) Sidoarjo. Pemiliknya menggunakan toko itu untuk menjual barang memabukkan itu secara eceran. Padahal, dari izin yang diperlihatkan pedagang miras tersebut tertera sebagai distributor. Bukan sebagai pengecer yang dapat melakukan

penjualan langsung kepada masyarakat.

Sidak dilakukan bersama Dandim 0816/Sidoarjo Letkol. Inf Abraham Pribadi. Dalam sidak malam itu, Bupati Subandi menemukan penjualan miras dengan kadar alkohol yang tinggi. Miras golongan B dengan kandungan alkohol di atas 20 persen tidak boleh dijual di toko-toko.

"Ada tiga ruko yang berjualan minuman keras. Izin yang kita jumpai adalah distributor. Kalau izinnya distributor, tentu tidak boleh jualan ritel. Distributor adalah gudang untuk penyimpanan minuman. Tapi sudah menyalahi aturan, seperti

ritel, jualan eceran. Itu melanggar aturan," ujarnya.

Bupati Subandi menyatakan Pemkab Sidoarjo tidak pernah mengeluarkan izin penjualan miras secara eceran. Subandi juga memastikan tidak akan pernah memberikan izin penjualan miras.

Izin distributor penjualan miras diperoleh para pedagang lewat izin OSS (Online Single Submission) yang dikelola Kementerian Investasi dan Filialisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Ini bentuk sosialisasi, antara Forkopimda DPRD. Kita akan sidak setiap hari. Besok kita rapat dengan camat, Forkopimda,

biar gerak semua. Sidak-sidak di kecamatan yang ada penjual minuman keras, termasuk di warung-warung," ujarnya.

Dalam sidak kali ini, disita 624 botol miras. Kandungan alkohol miras-miras tersebut di atas 20 persen. Penjual miras akan dipanggil untuk menjalani sidak. Toko-tokonya harus tutup.

Jika penjualan miras secara dilakukan kembali, seluruh barang dagangannya akan disita. "Saya minta kepada masyarakat yang mengetahui ada yang berjualan miras bisa dilaporkan kepada kantor kecamatan atau ke Pemkab Sidoarjo," ujarnya.

(sidi/yoki/dni)

Ketua Komisi D Bantu Dua Bocah Cerebral Palsy di Tulangan

TULANGAN-Harapan baru menghampiri dua anak penyandang Cerebral Palsy (CP) dari keluarga kurang mampu di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan. Setelah menerima laporan dari kader desa, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori langsung turun ke lapangan untuk memastikan kedua anak tersebut mendapatkan penanganan yang layak.

Tak hanya memastikan

keberlanjutan terapi medis, Dhamroni juga mengupayakan bantuan kursi roda melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo. Dalam kunjungan itu, ia turut memastikan seorang warga lanjut usia (lansia), Sulami (71), memperoleh tongkat sebagai alat bantu berjalan.

Kunjungan dilakukan pada Jumat (31/7) setelah Dhamroni menerima laporan mengenai dua anak penyand

dang CP yang membutuhkan perhatian. Mereka adalah Muhammad Rasyiqul Arzan (5), warga RT 03/RW 03 Desa Grogol, putra pasangan Moh Jakariya dan Ninik Uripa Rawati, serta Arsal Al Azan (3,5), warga RT 02/RW 07 Perumahan Harmoni Kota, Desa Grogol.

Rasyiqul membutuhkan kursi roda dan terapi motorik secara rutin. Sementara Arsal saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit rujukan dan akan terus mendapat pendampingan agar proses terapinya berjalan optimal.

"Saya mendapat informasi dari salah satu kader di Desa Grogol



PEDELI: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori saat mengunjungi dua anak penyandang Cerebral Palsy (CP) di Desa Grogol Kecamatan Tulangan.



Bupati Subandi menegaskan perang melawan miras.

Razia Serentak 18
Kecamatan di Sidoarjo

Subandi Tegaskan Perang Lawan Miras

Sidoarjo-HARIAN BANGSA

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar razia minuman keras (miras) secara serentak di 18 kecamatan, Sabtu (1/8/2026) malam. Operasi yang melibatkan Forkopimda, Forkopimka, serta seluruh camat itu berhasil menyita 1.696 botol miras dari berbagai lokasi.

Temuan terbesar berasal dari kawasan Graha Kota. Petugas mengamankan 851 botol miras dari sebuah ruko yang berkedok toko vape. Sementara 845 botol lainnya disita dari sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan razia dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberantas peredaran miras ilegal yang dinilai menjadi salah satu pemicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Sidoarjo perang melawan miras. Alhamdulillah, malam ini teman-teman camat bergerak serentak dan berhasil menemukan peredaran miras di sejumlah wilayah," kata Subandi, Sabtu (1/8/2026) malam.

Menurutnya, temuan gudang miras yang menyamar sebagai toko vape menunjukkan pelaku terus berupaya mengelabui petugas.

"Kalau dilihat dari depan memang toko vape. Setelah dicek ke belakang, ternyata menjadi gudang miras. Jumlahnya sekitar 851 botol," ujarnya.

Selain menyita ribuan botol miras, petugas juga menemukan dugaan penyalahgunaan izin usaha. Salah satu pemegang izin distributor diduga menjual miras secara eceran kepada masyarakat melalui aplikasi daring.

Subandi menegaskan praktik tersebut melanggar ketentuan dan akan ditindak tegas oleh pemerintah daerah.

"Jangan coba-coba mengelabui petugas. Mengaku distributor, tetapi menjual eceran lewat aplikasi online. Praktik seperti ini akan kami tindak tegas," tegasnya.

Ia memastikan operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala. Menurutnya, pelibatan seluruh camat membuat pengawasan terhadap peredaran miras di masing-masing wilayah menjadi lebih efektif.

"Razia seperti ini akan terus kami lakukan untuk mempersempit ruang gerak peredaran miras di Kabupaten Sidoarjo," ujarnya. (dtj/ns)

Bupati Larang Panitia Agustusan Patok Nominal Iuran Warga

■ Cukup Seikhlasnya

KOTA-Bupati Sidoarjo Subandi mengingatkan seluruh panitia penyelenggara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk karang taruna di tingkat desa dan lingkungan, agar tidak menetapkan besaran iuran kepada warga.

Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam memeriahkan peringatan 17 Agustus harus bersifat sukarela dan tidak boleh menjadi beban, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.



Silakan merayakan
kemerdekaan 17 Agustus,
namun partisipasi yang
diminta harus bisa diterima
lingkungan dan tidak
memberatkan masyarakat."

Subandi
Bupati Sidoarjo

Subandi menegaskan, iuran untuk kegiatan Agustusan merupakan bentuk swadaya masyarakat. Karena itu, panitia tidak diperbolehkan menentukan nominal tertentu. Warga dipersilakan memberikan sumbangan sesuai kemampuan dan keikhlasan masing-masing.

"Untuk iuran atau uang partisipasi HUT Kemerdekaan RI, karang taruna maupun penyelenggara dilarang menentukan nominal uang iuran yang diberikan warga.

Karena ini bentuknya swadaya masyarakat, pemberian harus seikhlasnya saja, apalagi kondisi ekonomi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja," ujar Subandi, Minggu (2/8).

Ia menilai semangat gotong royong dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan harus tetap dijaga tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat. Menurutnya, peringatan 17 Agustus seharusnya menjadi momentum mempererat persatuan dan kebersamaan, bukan justru menambah beban bagi warga.

Selain soal iuran, Subandi juga meminta panitia lebih selektif dalam menyusun rangkaian kegiatan peringatan HUT RI. Kegiatan yang digelar diharapkan sederhana, bermanfaat, serta dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Silakan merayakan kemerdekaan 17 Agustus, namun partisipasi yang diminta harus bisa diterima lingkungan dan tidak memberatkan masyarakat," tegasnya. (dik/vga)

Razia Serentak, Sita 1.696 Botol Miras, Gudang Berkedok Toko Vape Terbongkar

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mengencakan pemberantasan peredaran minuman keras (miras) ilegal. Dalam razia gabungan yang digelar secara serentak, Sabtu (1/8) malam, petugas berhasil menyita 1.696 botol miras dari berbagai lokasi. Salah satu temuan terbesar berasal dari sebuah gudang berkedok toko vape di kawasan Graha Kota Sidoarjo.

Razia tersebut melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (For-



pim-da), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (For-kopimka), serta seluruh camat di 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. Operasi menyasar toko, warung, hingga lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan maupun penjualan miras ilegal. Dari hasil operasi, petugas



TEGAS: Bupati Sidoarjo Subandi memimpin razia minuman keras (miras) ilegal di sejumlah lokasi di Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (1/8) malam.

FENOMENA

mengamankan 851 botol miras dari sebuah ruko yang tampak seperti toko vape. Setelah dilakukan pemeriksaan, bagian belakang bangunan tersebut ternyata digunakan sebagai gudang penyimpanan minuman keras. Sementara itu, sebanyak 846 botol lainnya disita dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, razia serentak ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menekan peredaran miras yang kerap menjadi pemicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. "Sidoarjo perang melawan miras. Alhamdulillah, malam ini teman-teman camat bergerak serentak dan berhasil menemukan peredaran miras di sejumlah wilayah," ujar Subandi.

Menurutnya, temuan gudang miras yang disamarankan sebagai toko vape menunjukkan pelaku terus mencari cara untuk mengelabui petugas.

"Kalau dilihat dari depan memang toko vape. Setelah dicek ke bagian belakang, ternyata digunakan sebagai gudang miras. Jumlahnya sekitar 851 botol," ungkapnya.

Selain menyita ribuan botol miras, petugas juga menemukan dugaan penyalahgunaan

izin usaha. Salah satu pemegang izin distributor diduga menjual minuman keras secara eceran kepada masyarakat melalui aplikasi daring, padahal praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subandi menegaskan, Pemkab Sidoarjo tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang menyalahgunakan izin untuk mengedarkan miras secara ilegal. (dik/vga)

CS



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tutup 3 Toko di KNV



Bupati Sidoarjo, Subandi memimpin langsung razia toko miras di Perumahan Kahuripan Nirwana Village.

Sidoarjo, Memorandum

Bupati Sidoarjo Subandi menindak tegas tempat penjualan minuman keras (miras) yang menyalahi ketentuan. Tiga tempat penjualan miras di ruko ditutup saat itu juga saat inspeksi mendadak (sidak) Jumat malam, (31/7).

Tiga ruko itu berada di kawasan Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) Sidoarjo. Pemiliknya menggunakan toko itu untuk menjual barang memabukkan itu secara eceran. Padahal, dari izin yang diperlihatkan pedagang miras tersebut tertera sebagai distributor. Bukan sebagai pengecer yang dapat melakukan

penjualan langsung kepada masyarakat.

Sidak dilakukan bersama Dandim 0816/Sidoarjo Letkol. Inf Abraham Pribadi. Dalam sidak malam itu, Bupati Subandi menemukan penjualan miras dengan kadar alkohol yang tinggi. Miras golongan B dengan kandungan alkohol di atas 20 persen tidak boleh dijual di toko-toko.

“Ada tiga ruko yang berjualan minuman keras. Izin yang kita jumpai adalah distributor. Kalau izinya distributor, tentu tidak boleh jualan retail. Distributor adalah gudang untuk penyimpanan minuman. Tadi sudah menyalahi aturan, seperti

retail, jualan eceran. Itu melanggar aturan,” ujarnya.

Bupati Subandi menyatakan Pemkab Sidoarjo tidak pernah mengeluarkan izin penjualan miras secara eceran. Subandi juga memastikan tidak akan pernah memberikan izin penjualan miras.

Izin distributor penjualan miras diperoleh para pedagang lewat izin OSS (Online Single Submission) yang dikelola Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Ini bentuk sosialisasi, antara Forkopimda DPRD. Kita akan sidak setiap hari. Besok kita rapat dengan camat, Forkopimda,

biar gerak semua. Sidak-sidak di kecamatan yang ada penjual minuman keras, termasuk di warung-warung,” ujarnya.

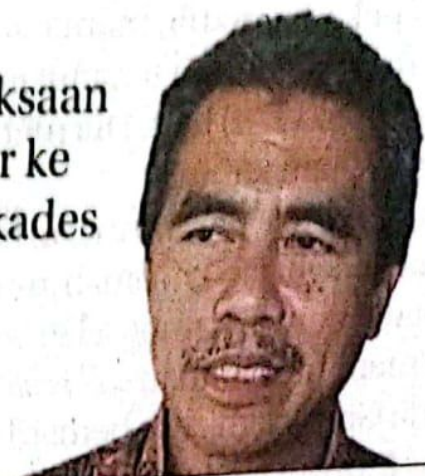
Dalam sidak kali ini, disita 624 botol miras. Kandungan alkohol miras-miras tersebut di atas 20 persen. Penjual miras akan dipanggil untuk menjalani disidang. Toko-tokonya harus tutup.

Jika penjualan miras secara dilakukan kembali, seluruh barang dagangannya akan disita. “Saya minta kepada masyarakat yang mengetahui ada yang berjualan miras bisa dilaporkan kepada kantor kecamatan atau ke Pemkab Sidoarjo,” ujarnya.

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

✓  Jika menemukan adanya pemaksaan dalam iuran, masyarakat bisa melapor ke Dinas PMD Sidoarjo. Ada sanksi jika kades terbukti melanggar aturan."

Probo Agus Sunarno
Kepala Dinas PMD Sidoarjo



Paksa Warga Iuran HUT RI, Kades Terancam Pidana

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo menegaskan akan menindak kepala desa (kades) yang terbukti memaksa masyarakat membayar iuran untuk peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Penarikan iuran hanya diperbolehkan apabila dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan maupun penetapan nominal tertentu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo Probo Agus Sunarno mengatakan, masyarakat dipersilakan menggelar kegiatan HUT RI secara swadaya. Namun, pemerintah melarang adanya iuran yang

diwajibkan kepada warga. "Kalau sifatnya swadaya dan sukarela tidak ada persoalan. Yang tidak diperbolehkan adalah iuran yang diwajibkan atau dipaksakan," katanya.

Probo menegaskan, masyarakat yang menemukan praktik pemaksaan pembayaran iuran oleh kades dapat segera melaporkannya kepada Dinas PMD Sidoarjo. Setiap laporan akan diverifikasi dan apabila terbukti terjadi pelanggaran, kasus tersebut akan diteruskan kepada Inspektorat untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jika menemukan adanya pemaksaan dalam iuran, masyarakat bisa melapor ke Dinas PMD Sidoarjo. Ada sanksi jika kades ter-

bukti melanggar aturan," tambah Probo. Adapun sanksinya bisa administratif hingga sanksi pidana.

Kurangi Beban Masyarakat

Untuk sanksi administratif dilakukan dengan memberikan teguran tertulis. Selain itu, ada sanksi pidana yang juga berpotensi untuk diberikan. Kades bisa dipidanakan karena dianggap melakukan pungutan liar (pungli).

Pemkab berharap seluruh pemdes mematuhi kebijakan tersebut. Tidak se-kadar mencegah pungli. Namun, juga untuk mencegah bertambahnya beban masyarakat secara perekonomian. (ful/hen)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua Komisi D Bantu Dua Bocah Cerebral Palsy di Tulangan

TULANGAN-Harapan baru menghampiri dua anak penyandang Cerebral Palsy (CP) dari keluarga kurang mampu di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan. Setelah menerima laporan dari kader desa, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlari langsung turun ke lapangan untuk memastikan kedua anak tersebut mendapatkan penanganan yang layak.

Tak hanya memastikan

keberlanjutan terapi medis, Dhamroni juga mengupayakan bantuan kursi roda melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo. Dalam kunjungan itu, ia turut memastikan seorang warga lanjut usia (lansia), Sulami (71), memperoleh tongkat sebagai alat bantu berjalan.

Kunjungan dilakukan pada Jumat (31/7) setelah Dhamroni menerima laporan mengenai dua anak penyan-

dang CP yang membutuhkan perhatian. Mereka adalah Muhammad Rasyiqul Arzan (5), warga RT 03/RW 03 Desa Grogol, putra pasangan Moh Jakariya dan Ninik Uripa Rawati, serta Arsal Al Azan (3,5), warga RT 02/RW 07 Perumahan Harmoni Kota, Desa Grogol.

Rasyiqul membutuhkan kursi roda dan terapi motorik secara rutin. Sementara Arsal saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit rujukan dan akan terus mendapat pendampingan agar proses terapinya berjalan optimal.

"Saya mendapat informasi dari salah satu kader di Desa Grogol bahwa ada anak penyandang CP dan seorang nenek yang membutuhkan alat bantu berjalan. Karena itu



PEDULI: Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlari saat mengunjungi dua anak penyandang Cerebral Palsy (CP) di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan.

saya langsung datang untuk melihat kondisi sebenarnya. Anak ini memang membutuhkan kursi roda," ujar Dhamroni, Minggu (2/8).

Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Baznas Sidoarjo agar bantuan segera disalurkan.

"Sudah saya koordinasikan dengan Baznas. Insyaallah dalam waktu dekat alat bantu jalan untuk nenek dan kursi roda untuk anak ini segera dikirim katanya. (dik/vga)

CS

RADAR
SIDOARJO.ID

PEREDARAN
MIRAS
DI KOTA DELTA

Keluhan terha-
dap toko miras
diawali warga
Sarirogo

MUI mere-
komendasikan
16 usaha
ditutup

Sebagian toko
miras belum
disegel meski
menyalahi izin

Razia gabungan
melibatkan seluruh
kecamatan pada
Sabtu (1/8)

Sumber:
Berbagai
Informasi



M. SARIJA, BAHAMU JAWA POS

Botol Miras Disita, Tempat Usaha Dibiarkan Tetap Buka

POTENSI JUALAN LAGI: Toko miras berkedok penjualan vape di Kompleks Ruko Graha Kota belum disegel hingga kemarin (2/8). Petugas sempat menyita ratusan botol miras dari tempat tersebut, Sabtu (1/8) malam.

Satpol PP: Masih Tahap Penyidikan

SIDOARJO - Penindakan toko minuman keras (miras) oleh Pemkab Sidoarjo dinilai belum efektif. Meski 2.320 botol miras telah disita dalam operasi serentak dan gabungan Sabtu (1/8) malam, toko-toko tersebut masih belum disegel dan berpotensi beroperasi lagi. Semisal, toko miras berkedok jualan Vape di Kawasan Ruko Graha Kota. Petugas menyita lebih dari 200 botol miras dari tempat usaha yang tak berizin ter-

sebut Sabtu (1/8) malam. Meski jelas-jelas melanggar perizinan, toko tak disegel. Bahkan, masih ada aktivitas di toko tersebut kemarin (2/8).

"Saya hanya pegawai. Kalau mau tanya-tanya nanti malam," kata salah satu pekerja.

Plt Kabid Penertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Sidoarjo R Novianto Koesno Adi Putro mengaku terkejut saat mendapatkan informasi masih adanya aktivitas di toko tersebut. Menurutnya, toko itu seharusnya tidak lagi beroperasi karena seluruh stok miras telah diamankan.

Novianto menjelaskan, pihaknya belum melakukan



Saya mendengar pemkab memberikan kesempatan tiga hari untuk tidak beroperasi. Kesannya kok tidak tegas dan seperti malu-malu."

Choirul Mu'minin
Ketua GP Ansor Sidoarjo

penyegehan karena proses penindakan masih memasuki tahap penyidikan. "Sekarang,

kami masih rekap dulu. Nanti akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya," imbuhnya.

Berharap Penindakan Tak Hanya Seremonial

Ketua GP Ansor Sidoarjo Choirul Mu'minin menilai pemkab seharusnya tidak berhenti pada penyitaan barang bukti. Toko yang terbukti melanggar izin seharusnya langsung ditutup agar tidak kembali beroperasi. Dia berharap, penindakan miras tidak sekadar seremonial.

Choi, sapaan akrab Choirul mempertanyakan mengenai tenggat tiga hari yang diberikan pemkab kepada pengusaha.

Menurutnya, langkah tersebut justru membuat penindakan terkesan tidak tegas. "Saya mendengar pemkab memberikan kesempatan tiga hari untuk tidak beroperasi. Kesannya kok tidak tegas dan seperti malu-malu," ujarnya.

Melalui akun Instagram pribadinya, Bupati Sidoarjo Subandi memastikan akan mengambil tindakan lebih tegas apabila toko tersebut masih nekat beroperasi. "Kami panggil hari Senin (hari ini, Red). Kalau masih buka kami ambil semua," ujarnya. Dia mengatakan, pemkab belum pernah memberikan izin edar minuman beralkohol. (ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Razia 18 Kecamatan, Tim Gabungan Sita 1.696 Botol Miras

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengobarkan perang terhadap peredaran minuman keras (miras) ilegal. Razia serentak yang digelar bersama Forkopimda dan Forkopimka di 18 kecamatan, Sabtu (1/8) malam, membuahkan hasil besar.

Sebanyak 1.696 botol miras disita dari berbagai lokasi. Operasi gabungan itu menyasar toko, warung, hingga tempat yang diduga menjadi lokasi penyimpanan dan penjualan miras.

Temuan terbesar berasal dari kawasan Graha Kota. Petugas mengamankan 851 botol miras dari sebuah ruko yang berkedok toko vape. Sementara 845 botol lainnya disita dari kecamatan lainnya.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, razia dilakukan serentak dengan melibatkan

seluruh camat sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah menekan peredaran miras yang dinilai menjadi pemicu berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Sidoarjo perang melawan miras. Alhamdulillah, malam ini teman-teman camat bergerak serentak dan berhasil menemukan peredaran miras di sejumlah wilayah," ujarnya.

Menurut Subandi, temuan gudang berkedok toko vape menunjukkan pelaku terus mencari cara mengelabui petugas. Dari depan, bangunan itu tampak

seperti toko rokok elektrik.

Namun, bagian belakangnya dipenuhi ratusan botol minuman keras. "Kalau dilihat dari depan memang toko vape. Setelah dicek ke belakang, ternyata menjadi gudang miras. Jumlahnya sekitar 851 botol," ungkapnya.

Petugas juga menemukan dugaan penyalahgunaan izin usaha. Salah satu pemegang izin distributor diduga menjual miras secara eceran kepada masyarakat melalui aplikasi daring. Praktik tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.

"Jangan coba-coba mengelabui petugas. Mengaku distributor, tetapi menjual eceran lewat aplikasi online. Praktik seperti ini akan kami tindak tegas," tegasnya.

Ia memastikan operasi seru-

pa akan terus dilakukan secara berkala untuk mempersempit ruang gerak peredaran miras di Sidoarjo. Menurutnya, keterlibatan camat dalam operasi kali ini membuat pengawasan di setiap wilayah berjalan lebih efektif.

Ia pun mengajak masyarakat ikut mengawasi lingkungan sekitar. Warga diminta tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya penjualan maupun penyimpanan miras ilegal.

"Kalau ada informasi mengenai peredaran miras, segera laporkan kepada pemerintah daerah atau camat setempat. Setiap laporan akan langsung kami tindak lanjuti," pungkasnya. (sud/jok/fdn)

Razia di 18 kecamatan berhasil menyita 1.696 botol miras.



MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Tolak Keberadaan TOKO MIRAS

Warga Sarirogo Gelar Doa Bersama di Depan Toko

Sidoarjo-HARIAN BANGSA
Puluhan warga Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo menggelar doa bersama dan istighosah di area toko minuman keras (miras) Ruko Citra City Residence, Jumat (31/7). Kegiatan yang diinisiasi Forum Peduli Sarirogo Sidoarjo (Forpiss) itu menjadi bentuk ikhtiar agar pemerintah terketuk hatinya untuk menindaklanjuti aspirasi warga yang menolak keberadaan toko miras.

Doa bersama digelar usai Salat Jumat sekitar pukul 13.00. Warga tampak memanjatkan doa agar Kota Delta dijauhkan dari penyakit masyarakat, seperti peredaran miras, narkoba, prostitusi, hingga dampak penyalahgunaan narkotika.

Ketua Forum Peduli Sarirogo Sidoarjo (Forpiss) Chusen Alghozi mengatakan, kegiatan itu bukan sekadar bentuk penolakan terhadap miras. Menurutnya, warga memilih menempuh cara-cara damai den-



Tampak puluhan warga saat menggelar aski istighosah dan doa bersama di depan toko penjual miras.

gan mengetuk pintu langit sambil berharap pemerintah mendengar aspirasi masyarakat.

"Kami menggelar doa bersama dan istighosah agar Allah memberikan jalan terbaik, kami berharap pemerintah terketuk hatinya dan berpihak

pada kepentingan masyarakat dan segera mengambil langkah atas persoalan yang kami suarakan," katanya.

Chusen menegaskan, warga tidak ingin polemik toko miras terus berlarut-larut. Sebab, keberadaan usaha tersebut dinilai menimbulkan kere-

sahan di lingkungan sekitar, terutama bagi warga yang menginginkan lingkungan tetap kondusif.

Sejak awal Forpiss telah menyampaikan aspirasi melalui berbagai cara, mulai dari audiensi hingga menyampaikan keberatan kepada pemerintah. Karena itu, doa bersama menjadi ikhtiar spiritual agar persoalan tersebut segera mendapat penyelesaian.

"Kami ingin Sidoarjo, Sarirogo khususnya menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan jauh dari penyakit masyarakat, harapan kami sederhana, semoga pemerintah benar-benar mendengar suara warga," tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Makin Rahmat, kuasa hukum yang mendampingi warga Sarirogo. Dia menilai doa bersama menjadi ikhtiar terakhir warga setelah berbagai upaya penyampaian aspirasi ditempuh. Mereka hanya ingin pemerintah segera mengambil sikap atas polemik yang terjadi.

"Kami berharap doa ini bisa mengetuk hati para pemangku kebijakan," ujarnya. (cat/ns)

Masa Tunggu Pengukuran Tanah Maksimal Tujuh Hari

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat pelayanan. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan, bahwa percepatan standar waktu pelayanan adalah bagian dari transformasi layanan pertanahan. Nusron mengatakan, kebijakan tersebut salah satunya dilakukan dengan penerapan sistem Pengukuran Terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan yang dimulai pada 17 Agustus 2026.

"Nanti masa tunggu pengukurannya maksimal tujuh hari. Ada kepastian kapan diukurnya, jangan sampai tidak ada kepastian. Gunakan pendekatan first in, first out, yang datang duluan di-

ukur duluan dan masa tungguanya tujuh hari," ujar Nusron saat memberikan pengarahannya kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, di Semarang.

Dengan sistem Pengukuran Terjadwal, masyarakat yang mendaftarkan permohonan di Kantor Pertanahan, akan memperoleh jadwal pelayanan pengukuran dengan masa tunggu paling lama 7 (tujuh) hari. "Durasi penyelesaian pekerjaan setelah pengukuran

maksimal 5 (lima) hari hingga menghasilkan Peta Bidang Tanah (PBT). Sejak permohonan diajukan hingga PBT diterbitkan, total waktu pe-

layanan maksimal adalah 12 hari," ujarnya.

Dengan begitu, alur pelayanan menjadi lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian untuk masyarakat. Bagi yang membutuhkan waktu penyelesaian pengukuran lebih cepat, Kementerian ATR/BPN juga menyiapkan layanan premium dengan tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan.

"Transformasi layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN tidak hanya dalam sistem pengukuran. Standar waktu penyelesaian

layanan Peralihan Hak juga dipercepat," jelasnya.

Nusron menetapkan target penyelesaian Peralihan Hak rampung dalam 10 hari kerja, yang dimulai terhitung setelah proses verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dia juga mengatakan, apabila masyarakat mendapati kendala dalam proses verifikasi BPHTB, Kementerian ATR/BPN akan mendorong proses tersebut dengan membuat Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri. "Kalau pemerintah daerah lama, kita akan membuat Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri ATR/Kepala BPN," jelasnya. (idr/bas)

PERCEPAT LAYANAN:

Nusron Wahid memberikan arahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi DIY dan Jawa Tengah, di Semarang.



HUMAS ATR/BPN

CS

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

VERIFIKASI:
Tim Ahli Cagar Budaya Sidoarjo bersama Komunitas Tilik Mburi meninjau kompleks Pabrik Gula Candi kemarin (2/8). Bangunan peninggalan industri gula tersebut dinilai masih mempertahankan keaslian arsitektur.

Tilik Mburi Usulkan PG Candi Jadi Bangunan Cagar Budaya

SIDOARJO - Kompleks kantor Pabrik Gula (PG) Candi diusulkan untuk menjadi cagar budaya. Usulan tersebut mulai ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Sidoarjo kemarin (2/8).

Founder Tilik Mburi Radhitya Probo Ratu Nagoro mengatakan, usulan penetapan kompleks kantor PG Candi sebagai cagar budaya sebenarnya telah diajukan sejak lama. Namun, proses verifikasi baru dilakukan bertepatan dengan kegiatan tur musim giling yang digelar akhir pekan.

"Bangunan kami usulkan karena masih asli," katanya. Dalam proses verifikasi, TACB mencocokkan fasad bangunan dengan dokumentasi lama, meneliti peta milik PG Candi, serta menginventarisasi prasasti yang berada di kawasan pabrik. Tim juga memeriksa bagian dalam kantor, termasuk material asli seperti tegel, hingga kondisi lingkungan di sekitar bangunan.

Menurut Radhitya, kompleks kantor PG Candi masih memiliki tingkat keaslian yang tinggi sehingga dinilai memenuhi unsur penting sebagai bangunan bersejarah. Keberadaan bangunan tersebut juga menjadi saksi perkembangan industri gula di Sidoarjo yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya mengenal bangunannya, tetapi juga memahami sejarah industri gula yang masih hidup di Sidoarjo," kata Radhitya. Apabila lolos tahapan kajian dan memenuhi seluruh persyaratan, kompleks kantor PG Candi berpotensi ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya di Kota Delta. (eza/hen)

Jawa Pos

PKB Mulai Petakan Calon Ketua Pengurus Anak Cabang

Jelang Musyawarah di Tingkat Kecamatan

SIDOARJO - DPC PKB Sidoarjo mulai mematangkan persiapan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) yang akan digelar di seluruh kecamatan. Forum tersebut diklaim menjadi pintu masuk regenerasi kepemimpinan sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi menjelang agenda politik ke depan.

Dalam rapat persiapan, pengurus di tingkat kecamatan akan memetakan bakal calon Ketua DPAC serta menyusun tahapan pelaksanaan Musancab. DPC PKB Sidoarjo menargetkan seluruh proses berjalan tertib, demokratis, dan sesuai

dengan mekanisme organisasi.

Ketua DPC PKB Sidoarjo Rizza Ali Faizin mengatakan, Musancab bukan sekadar memilih pengurus baru, tetapi menjadi bagian penting dari proses kaderisasi partai. Karena itu, pihaknya ingin forum tersebut menghasilkan ketua-ketua DPAC yang mampu memperkuat organisasi hingga tingkat kecamatan.

"Ketua-ketua DPAC yang terpilih harus amanah, memiliki orientasi kerakyatan, serta siap memperkuat perjuangan PKB di tengah masyarakat," ujarnya. Rizza berharap Musancab mampu memperkuat konsolidasi organisasi, merawat basis dukungan, sekaligus memperluas kekuatan PKB di Kota Delta. (ful/hen)



PKB SIDOARJO

KONSOLIDASI: Pengurus DPC PKB Sidoarjo menggelar rapat untuk membahas persiapan Musyawarah Anak Cabang.

CS dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

ESTETIKA TATARUANG DI KALIPECABEAN TERGANGGU AKIBAT SEMRAWUTNYA KABEL FIBER OPTIK

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Semrawutnya penggunaan bersama infrastruktur pasif (kabel fiber optik) di sepanjang ruas jalan Kabupaten Desa Kali Pecabean Kecamatan Candi berdampak mengganggu prasarana kantor pelayanan publik (kantor Kepala Desa), karena selain merusak estetika kantor pelayanan, Dampak Buruk dari semrawutnya Kabel fiber optik tersebut sangat mengganggu keluar masuknya kendaraan berat (truck) jika melakukan transaksi kepada Pemerintah Desa diantaranya Kabel yang menjuntai rendah menghalangi gerbang menuju kantor pelayanan dan Tiang yang miring dan beban kabel yang berlebih berpotensi roboh sehingga bisa menimpa fasilitas atau masyarakat jika berkunjung ke kantor kepala Desa Maupun wali murid yang mengantar putra putrinya bersekolah.

Di dalam Aturanya sudah di perjelas bahwa Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi berlandaskan asas kaidah tata ruang, kemanfaatan, keselamatan serta estetika, tetapi pada realita

dilapangan hasil investigasi jurnalis pojok Kiri Dilapangan banyak di jumpai khususnya di ruas jalan Kabupaten Desa Kali pecabean kabel fiber optic semrawut dan bisa jadi membahayakan bagi siapapun.

Dalam keterangannya se-bagian warga menyampaikan” kondisi kabel fiber optic dari berbagai jaringan yang melintas di sepanjang jalan Desa Kalipecabean kondisinya sangat membahayakan bagi masyarakat sekitar, pasalnya banyak kabel yang kondisinya menjuntai ke tanah dan infrastuktur (Tiang) sistem pendukung kabel banyak yang miring. Minggu (2/3).

“Kami selaku masyarakat kali pecabean menekankan bagi pelaku usaha (para Provider) penggunaan bersama infrastruktur pasif yang menimbulkan gangguan yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan penggunaan bersama menyelesaikan gangguan yang merugikan secara berkoordinasi antara provider yang satu dengan provider yang lain,” pungkasnya. (Nang)



Agustus 2026 10.01

CS dipinda dengan CamScanner

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Perkuat Dukungan Penindakan Miras Tanpa Izin



KaMedia – DPRD Kabupaten Sidoarjo menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menindak tegas peredaran minuman keras (miras) tanpa izin yang masih marak di Kota Delta. Komitmen tersebut disampaikan saat DPRD mengikuti sidak peredaran miras ilegal bersama Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Polres Sidoarjo di Gedung DPRD Sidoarjo, Jumat (1/8/2026). Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono, menegaskan peredaran miras tanpa izin tidak boleh dibiarkan karena berpotensi memicu gangguan ketertiban, meningkatkan angka kriminalitas, serta mengancam kesehatan masyarakat. “Kami di DPRD mendukung penuh langkah tegas Pemkab. Jangan sampai ada pembiaran. Izin harus jelas, tempat penjualan harus sesuai aturan, dan sanksi harus ditegakkan,” tegas Warih. Ia memastikan DPRD akan mengawal pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur pengawasan minuman beralkohol, mulai dari proses perizinan hingga penindakan di lapangan. “Regulasinya sudah ada. Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen bersama untuk menegakkan dan mengawasinya secara konsisten,” ujarnya. Politisi Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. “Setiap kebijakan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus melibatkan seluruh stakeholder. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tandasnya. Sidak gabungan tersebut menjadi penegasan bahwa DPRD dan Pemkab Sidoarjo akan memperkuat sinergi dalam memberantas peredaran miras ilegal demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat di Kota Delta.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Ketua DPRD Sidoarjo Apresiasi Sosialisasi RDTR Tulangan: Pastikan Kepastian Hukum dan Jaga Identitas Daerah



SIDOARJO, NUSANTARAPOS – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) terus mematangkan perencanaan pembangunan wilayah. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui sosialisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Tulangan Tahun 2025–2045, yang digelar di Hotel Luminor Sidoarjo, Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini diikuti seluruh kepala desa se-Kecamatan Tulangan. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih, Asisten III Setda Kabupaten Sidoarjo Bahrul Amig, serta Camat Tulangan Moch Andi Sulistiono. Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih menyambut positif langkah Dinas P2CKTR dalam menyosialisasikan RDTR hingga ke tingkat pemerintah desa. Menurutnya, keberadaan dokumen ini sangat penting untuk memberikan kepastian [hukum](#) bagi masyarakat maupun investor yang ingin mengembangkan usaha di wilayah Tulangan. "Pelaku usaha membutuhkan kejelasan mengenai kawasan yang diperbolehkan dan yang dibatasi untuk kegiatan tertentu. Dengan begitu, potensi pelanggaran tata ruang dapat diminimalkan," ungkap politikus senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Ia juga berharap penyusunan RDTR mampu mengakomodasi karakteristik dan kearifan lokal yang dimiliki Kecamatan Tulangan. Wilayah ini dinilai memiliki identitas khas dari sisi budaya, sejarah, maupun ekonomi masyarakat. Nasih menyebut keberadaan makam Mbah Jaelani, bangunan bersejarah, pabrik gula, hingga sejumlah pondok pesantren tua menjadi aset penting yang perlu diperhatikan dalam [perencanaan tata ruang](#). Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat yang banyak ditopang oleh pelaku UMKM juga menjadi ciri khas yang patut dipertahankan. "Keunikan Tulangan perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan ke depan, agar pertumbuhan wilayah tetap berjalan tanpa menghilangkan identitas asli daerah," tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo M. Bachruni Aryawan menjelaskan, keterlibatan kepala desa menjadi bagian sangat penting agar informasi tata ruang dapat tersampaikan dengan tepat hingga ke lapisan masyarakat. "Dengan pemahaman yang sama, diharapkan penggunaan lahan dan ruang di wilayah Tulangan dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan," terang Bachruni. RDTR berfungsi sebagai pedoman resmi dalam mengatur fungsi kawasan, mulai dari permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, hingga kawasan industri. Dokumen ini juga menjadi instrumen pengendalian agar pembangunan yang berlangsung tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. "Melalui RDTR, masyarakat dapat mengetahui peruntukan ruang secara jelas sehingga pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya. Selain itu, keberadaan dokumen ini akan mempermudah masyarakat maupun pelaku usaha dalam mengurus perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). "Dengan kepastian zonasi, proses legalitas usaha dapat berjalan lebih cepat dan terarah," tuturnya. Bachruni juga menegaskan, lahan yang masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tetap dapat dimanfaatkan sepanjang tidak mengubah fungsi utamanya sebagai lahan pertanian.(Aryo)

